

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD**

**PERKREDITAN RAKYAT DI TASIKMALAYA  
PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA  
DAN REPUBLIK INDONESIA (1900-2003)**

**Oleh:**

**Ketua: Widyo Nugrahanto, S.S., M.Si.**

**Anggota :1. N. Kartika, S.S., M.Hum.**

**2. Tanti Restiasih Skober, S.S., M.Hum**

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Padjadjaran**

**Tahun Anggaran 2008**

**Nomor SPK : 397/H6.26/LP/PL/2008**

**Tanggal : 16 April 2008**

**LEMBAGA PENELITIAN  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



**FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
Nopember 2008**

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENELITI MUDA (LITMUD) UNPAD**  
**SUMBER DANA DIPA UNPAD**  
**TAHUN ANGGARAN 2008**

1.	a. Judul Penelitian	: Perkreditan Rakyat di Tasikmalaya Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Republik Indonesia (1900-2003)
	b. Macam Penelitian	: <input type="checkbox"/> Dasar <input type="checkbox"/> Terapan <input type="checkbox"/> Pengembangan
	c. Kategori Penelitian	: I
2. Ketua Peneliti		
	a. Nama lengkap dan gelar	: Widyo Nugrahanto, S.S., M.Si.
	b. Jenis Kelamin	: Pria
	c. Pangkat/Gol/ NIP	: Penata Muda/IIIb/132306542
	d. Jabatan Fungsional	: Lektor
	e. Fakultas/Jurusan	: Sastra/Ilmu Sejarah
	f. Bidang Ilmu Yang Diteliti	: Ilmu Sejarah
3. Jumlah Tim Peneliti		
		: 3 (tiga) orang

4. Lokasi Penelitian	: Tasikmalaya, Bandung, Jakarta
5. Kerjasama dengan Institusi Lain	: -
a. Nama Institusi	: -
b. Alamat	: -
c. Telepon/Faks/e.mail	: -
6. Jangka Waktu Penelitian	: 8 (delapan) bulan
7. Biaya yang diperlukan	: Rp. 6.125.000,00 (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bandung, 13 Nopember 2008

Mengetahui :

Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Padjadjaran

Peneliti,

Prof. Dr. Dadang Suganda, M.Hum.  
NIP. 131 472 358

Widyo Nugrahanto, S.S., M.Si.  
NIP. 132 306 542

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian  
Universitas Padjadjaran

Prof. Oekan S. Abdoellah, MA., Ph. D.  
NIP 130 937 900

## **ABSTRAK**

Hasil penelitian ini berusaha mengungkap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tasikmalaya dan dampak kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tasikmalaya. Hal ini terkait dengan munculnya sistem perkreditan rakyat serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya sistem perkreditan rakyat di Tasikmalaya.

Untuk mengkaji masalah tersebut, digunakan metode sejarah. Ada empat tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan penulisan atau historiografi. Sektor ekonomi di Tasikmalaya dapat dikategorikan dalam ekonomi pedesaan, tentu saja yang berhubungan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, dan industri rumah tangga. Lembaga-lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, lumbung desa, dan bank, sudah banyak dikenal dalam kehidupan sektor ekonomi di Tasikmalaya; terutama atas campur tangan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian mengubah ekonomi petani di Tasikmalaya.. Di sebuah tempat yang miskin modal, namun memiliki sumber daya lain yang memadai, tentu sistem perkreditan yang tidak menjerat rakyat, sangat dibutuhkan.

Kata Kunci: Kredit, Koperasi, Lumbung Desa, Bank

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tasikmalaya dalam wacana sosial ekonomi, merupakan suatu wilayah kajian yang menarik. Seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Priangan, mata pencaharian sebagian besar penduduk Tasikmalaya adalah bertani, berdagang, dan bekerja sebagai buruh. Akan tetapi, Tasikmalaya juga terkenal sebagai pusat penghasil berbagai hasil kerajinan tangan seperti tikar, topi, batik tulis, bambu, kayu, tempurung, serta batik tulis (Marlina, 2007:33).

Sebuah tulisan di dalam majalah *Koloniale Studien* terbitan tahun 1919, berjudul *Tjina Minding; Eenige Aanteekenigen over het Chineesche geldschieterswezen op Java* yang ditulis oleh V. B. Van Gutem menyebutkan bahwa tidak ditemukan Cina Minding di Tasikmalaya. Padahal Cina Minding yang memberikan kredit pada rakyat kecil ini, menjadi masalah yang cukup serius bagi Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20.

Di sisi lain, perkreditan rakyat yang digerakan oleh Bank Daerah ternyata mengalami kemajuan yang cukup pesat di Tasikmalaya. Dalam *Memori Serah Jabatan di Jawa Barat 1921-1930*, disebutkan bahwa *Afdeeling* Tasikmalaya mempunyai 2 Bank Daerah, yaitu di Ciamis dan di Tasikmalaya. Bank Daerah di

Ciamis itu adalah lanjutan dari bank daerah ketika Ciamis masih menjadi *afdeeling* dari keresidenan Cirebon. Ketika daerah bagian selatan Karesidenan Cirebon itu digabungkan dengan Keresidenan Priangan, bank daerahnya tetap berdiri sendiri, karena ada kesulitan untuk menggabungkannya dengan bank daerah di Tasikmalaya. Tasikmalaya memiliki Bank Daerah yang paling maju di Keresidenan Priangan pada awal abad ke-20. Modal usahanya mendekati sejuta gulden.

Selain Bank Daerah, lumbung desa juga didirikan untuk memberi kredit berupa bahan pangan kepada penduduk pada masa panceklik. Lumbung ini sering disebut sebagai "Lumbung Miskin" atau "Lumbung Jakat". Akan tetapi, karena kepengurusan yang kurang baik, akhirnya lumbung ini sudah dihapus. Pada awal abad ke-20 lumbung yang masih berdiri adalah Lumbung Desa. Walaupun, jumlahnya juga berangsur-angsur berkurang, bahkan mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan karena pelaksanaannya sukar, antara lain mengenai pengangkutan padi, baik pengangkutan pada waktu meminjam maupun pada waktu mengembalikannya. Pengangkutan itu memerlukan biaya dan tenaga sendiri.

Faktor lain, yang menyebabkan usaha lumbung desa itu mundur bahkan kemudian lenyap adalah munculnya Bank Desa. Perkreditan dari Bank Desa memang lebih lincah daripada perkreditan dari lumbung.

Lumbung desa di Tasikmalaya, diubah menjadi Bank Desa bersaham dengan lumbung desa sebagai pemegang saham yang utama. Walaupun dari masa ke masa bank desa itu timbul tenggelam tetapi secara umum dapat dikatakan terus berkembang, karena ternyata jumlahnya terus bertambah. Pada awal abad ke-20 seluruh Karesidenan Priangan terdapat 317 bank desa, modal usahanya yang diputar berjumlah f 145.654,- (Memori Serah Jabatan 1921-1930 (Jawa Barat), 1976: LVIII).

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kredit kecil memang diperlukan di desa-desa. Apakah kemajuan di desa-desa disebabkan oleh kredit yang diberikan oleh bank-bank desa, memang perlu dilihat lebih lanjut. Akan tetapi, perdagangan kecil di desa-desa meningkat dan sebagian dari rakyat desa memperoleh pendapatannya dengan meningkatkan kesempatan berbagai usaha.

Beragamnya sistem perkreditan rakyat inilah yang menyebabkan, kajian ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Permasalahan dalam penelitian ini mencakup aspek spasial dan temporal. Aspek spasial penelitian ini berkenaan dengan wilayah yaitu berlokasi di Kabupaten Tasikmalaya. Aspek temporal mencakup waktu relatif panjang, yaitu dari 1900 sampai dengan 2003.

Menurut Kuntowijoyo (1994: 86), setelah mendapatkan satuan wilayah dan satuan waktu, perlu juga memahami satuan permasalahan dalam sejarah ekonomi pedesaan. Permasalahan ekonomi pedesaan atau ekonomi petani tentu tidak sama dengan ekonomi industrial atau ekonomi kota. Ekonomi pedesaan



memasukkan juga ekonomi primitif sekaligus dengan kerangka ekonomi pasar sekarang ini. Beberapa kemungkinan permasalahan yaitu tentang faktor-faktor ekonomi, sektor-sektor ekonomi, lembaga-lembaga ekonomi, komoditi, pertumbuhan, dan problem-problem.

Sektor ekonomi yang dikenal dalam ekonomi pedesaan tentu saja yang berhubungan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, dan industri rumah tangga. Lembaga-lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, lumbung desa, dan bank, sudah banyak dikenal dalam ekonomi pedesaan, terutama atas campur tangan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian mengubah ekonomi petani (Kuntowijoyo, 1994:87).

Di sebuah tempat yang miskin modal, namun memiliki sumber daya lain yang memadai, tentu sistem prekreditasi yang tidak menjerat rakyat, sangat dibutuhkan. Hal inilah yang menarik untuk diteliti. Dengan mempelajari kehidupan sosial ekonomi yang berkaitan dengan sistem perkreditasi rakyat di Tasikmalaya, maka bisa dilihat sistem perkreditasi rakyat seperti apa yang tidak berdampak buruk bagi rakyat kecil. Dengan demikian, kredit yang menjerat rakyat bisa dihindari.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian pendahuluan di atas, ada beberapa permasalahan yang muncul, yaitu:

1. Bagaimana kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tasikmalaya sepanjang 1900 sampai dengan 2003?
2. Bagaimana dampak dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tasikmalaya tersebut, jika dikaitkan dengan munculnya sistem perkreditan rakyat di Tasikmalaya?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembang sistem perkreditan rakyat di Tasikmalaya ?

## 1.3 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran sumber yang dilakukan, sepanjang diketahui, tidak ditemukan historiografi yang mengungkapkan tentang sejarah perkreditan rakyat di Tasikmalaya pada kurun waktu yang dibahas. Historiografi yang ada lebih menyoroti pada perkembangan kota dan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkannya, tidak difokuskan pada perkreditan.

Salah satu karya yang dapat dijadikan sumber acuan antara lain berjudul *Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah*. Buku ini ditulis oleh Dr. Hj. Ietje Marlina D., M.Si. Secara garis besar, buku tentang perubahan sosial di Tasikmalaya ini mendeskripsikan tentang berdirinya

Tasikmalaya yang pada awal berdirinya disebut Kabupaten Sukapura; siapa yang mendirikan dan kemudian menjadi bupati pertama di Sukapura, serta siapa saja keturunannya yang kemudian menjabat sebagai bupati. Diuraikan pula bagaimana perubahan ibu kota dari Sukaraja ke Manonjaya, kemudian ke Kota Tawang (Kota Tasikmalaya) sekarang, sampai kemudian namanya berubah menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Dalam buku ini digambarkan bagaimana perkembangan Tasikmalaya berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan itu meliputi perkembangan fisik kota, perkembangan sosial, dan peningkatan kehidupan perekonomian terutama di bidang pertanian dan perdagangan.

Tulisan-tulisan yang mengupas tentang sistem kredit antara lain buku yang ditulis oleh Sumitro Joyohadikusumo dan R. Dawam Rahardjo berjudul *Kredit Rakyat Pada Masa Depresi*. Buku yang diterbitkan tahun 1989 ini, memberikan banyak informasi bagaimana perkreditan rakyat sangat diperlukan pada masa depresi ekonomi di Indonesia pada umumnya. Selain itu, buku kaya M. G. Sulistyawardhani, berjudul *Kredit Rakyat; Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa*. Buku yang diterbitkan di Yogyakarta oleh Yayasan Kartika Budaya pada tahun 2000 ini, mengulas bagaimana sistem kredit rakyat yang dijalankan di Jawa. Tulisan lain yang mengulas sistem kredit, yaitu *Tjina Minding, Eenige aantekenigen over het Chineesche geldchieterswezen op Java* yang terbit dalam majalah *Koloniale Studien* Tahun III 1919 Jilid I. Dalam

tulisan ini Van Gutem membahas bagaimana sistem kredit yang dijalankan oleh orang-orang Cina, biasa disebut Cina Minding. Terdapat juga tulisan yang membahas tukang kredit Tasikmalaya, yang berjudul *Studi Proses dan Karakteristik Imigrasi Tukang Kredit dari Desa-Desa Kabupaten Tasikmalaya*. Tulisan ini merupakan hasil penelitian dari Sucipto pada tahun 1985.

Beberapa tulisan yang membahas kehidupan sosial ekonomi di Indonesia secara umum, antara lain *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia; Berbagai Tantangan Baru* dengan editor J. Thomas Lindblad. Buku yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 2000 ini merupakan kumpulan hasil penelitian yang memperlihatkan khasanah kehidupan sosial ekonomi di Indonesia, baik itu di Jawa maupun di Luar Jawa. Dalam buku ini terlihat bahwa ada lima kategori analisis umum dalam sejarah ekonomi modern Indonesia, yaitu pertanian, sektor-sektor di luar pertanian, kebijakan ekonomi, mentalitas dan metode, serta Indonesia di luar Pulau Jawa. Selain itu, buku *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia* dengan editor J. Thomas Linblad yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2002. Buku ini menggabungkan bagian-bagian yang kontras dalam segi analisis temporal maupun sosial: Jawa dan Luar Jawa, serta masa kolonial dan Indonesia merdeka. Dalam buku ini diuraikan bagaimana konsep Ekonomi Nasional itu muncul.

#### **1.4. Kerangka Konseptual**

Untuk memberikakn gambaran secara umum mengenai perkreditan, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai arti perkreditan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, dijelaskna bahwa kredit berarti pinjaman uang dengan pengembalian secara berangsur. Perkreditan pada dasarnya merupakan bentuk pemberian pinjaman yang berdasarkan kepercayaan kepada si peminjam.

Menurut Ter Haar, dasar pikiran dalam setiap tindakan perkreditan adalah bahwa jika seseorang memberikan sesuatu- benda atau jasa (bekerja) – kepada (untuk) orang lain, maka pada saat lain ia harus mendapat jasa. (Soeriaatmadja, 1987:41)

Pertumbuhan hubungan kredit dan hutang pedesaan berjalan seiring dengan meningkatnya monetisasi. Perkreditan berkembang dengan semakin meluasnya ekspansi pasar. Menurut Weber, masyarakat mengalami rasionalisasi, termasuk juga dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, rasionalisasi telah mengubah sistem ekonomi subsisten menjadi suatu sistem ekonomi pasar. Dalam ekonomi subsistem. Produksi dihasilkan hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan bila ada kelebihan hasil maka kelebihan hasil produksi tersebut ditukarkan dengan beberapa jenis barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, Dalam sistem ekonomi pasar ciri utamanya adalah digunakannya uang sebagai alat transaksi dan orientasi tindakan pelaku ekonomi yang mengarah pada

perolehan keuntungan. Dengan berkembangnya sistem ekonomi pasar ini maka peredaran uang menjadi semakin luas, demikian pula halnya dengan masalah perkreditan (Ritzer, 1994:220).

Banyak anggapan bahwa kebutuhan terhadap kredit merupakan gambaran psikologikal tertentu dari kaum tani. Metafora yang umum digunakan adalah penduduk pribumi yang lapar uang dan lapar kredit (*geld en crediet honger*). Ada anggapan bahwa keberhutangan merupakan hasil dari serbuan uang yang tiba-tiba ke dalam kehidupan pedesaan tradisional, sementara perkembangan sosial psikologis penduduk tidak dapat bersaing dengan cepatnya monetisasi. Hal inilah yang dianggap bertanggung jawab atas penyalahgunaan kredit oleh para peminjam di satu pihak dan dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan eksploitasi oleh pelepas uang di pihak lain sebagai sumber dana dalam masyarakat (Schrader, 1994:187).

Sebenarnya terdapat dua macam sumber dana atau kredit yang beredar dalam masyarakat, yaitu berasal dari lembaga keuangan resmi dan dari sumber dana tidak resmi. Sumber dana resmi antara lain meliputi dana dari perbankan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta, lembaga koperasi, dan lembaga lain yang terdaftar. Sumber dana tidak resmi antara lain sumber dana perseorangan, keluarga (*relativesi*), teman, serta sumber dana dari pelepas uang atau rentenir (Sumodiningrat dan Guritno Mangkusubroto, 1986:1).

Sistem kredit pedesaan yang berkaitan dengan sumber dana tidak resmi dalam masyarakat agraria tradisional telah lama diasosiasikan dengan "penghambaan bunga" atau riba, dan dianggap menghambat pembangunan desa yang digunakan untuk memperkuat pernyataan di atas, yaitu: pertama, kredit pedesaan tradisional sering menarik tingkat bunga di atas rata-rata. Kedua, dari perspektif sosioekonomi tingkat bunga yang tinggi memperlihatkan hubungan yang tidak seimbang antara kreditur dan debitur. Hal ini kemudian mengakibatkan ketergantungan kredit petani pada tuan tanah atau pelepas uang lainnya. Ketiga, ketergantungan kredit ini menciptakan suatu situasi yang mendorong hutang piutang yang secara bertahap menyimpangkan petani dari tujuannya untuk memproduksi. Akibatnya kredit pedesaan tradisional hanya sedikit berhubungan dengan produksi. Kebanyakan petani menggunakan kredit untuk tujuan konsumsi yang berpengaruh buruk pada produksi pertanian. Dalam hal ini kredit pedesaan merupakan suatu penyedot yang menggiring sumber-sumber keluar dari sektor pedesaan, membelenggu petani dalam suatu siklus hutang, menciptakan ketidakseimbangan di pedesaan dan mengganggu produksi (Ming Te Pan, 1996: 94)

Menurut Heru Nugroho, praktek pelepasan uang atau rentenir sesungguhnya telah memperkenalkan sistem budaya moneter ke dalam wilayah-wilayah yang subsisten. Mereka dapat dipandang sebagai agen-agen cara produksi kapitalis. Tanpa keberhasilan para pelepas uang, petani-petani sulit terintegrasi

dalam ekonomi pasar. Namun demikian, citra sosial para rentenir ini tidak sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi (Nugroho, 2001:35)

Para pemberi kredit dalam perekonomian masyarakat desa menciptakan suatu hubungan patron-klien. Menurut Scott hubungan patron-klien adalah hubungan ikatan antara dua person yang mana seseorang dengan status sosial ekonomi yang tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk melindungi kepentingan keduanya, sementara seseorang yang status sosial ekonominya lebih rendah (klien) untuk memperoleh perlindungan harus memberikan layanan kepada patronnya (Scott, 1976:41). Patron berada pada posisi yang lebih kuat, lebih tinggi, lebih kaya dari kliennya sehingga ia mampu memberi lebih banyak kepada klien, sehingga klien kemudian wajib membalas pemberian patronnya. Dalam hubungan ini terdapat perhitungan untung rugi.

Salah satu kredit yang berkembang di pedesaan adalah kredit pertanian. Menurut *International Encyclopedia of the Social Sciences*, kredit pertanian merupakan istilah yang diterapkan untuk dana yang dipinjam oleh individual, bisnis pertanian, dan lainnya untuk digunakan dalam produksi, penyimpanan, pemrosesan, dan pemasaran hasil bumi. Dengan kata lain kredit pertanian bertujuan memberikan dana kepada petani untuk pengeluaran selama berjalannya usaha, membeli sarana usaha dan melakukan perbaikan. Istilah tersebut juga digunakan untuk kredit yang disediakan untuk memperluas dan mengelola usaha pertanian.



### **1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem perkreditan rakyat yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Tasikmalaya selama kurun waktu 1900 sampai dengan 2003.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi minimal pada dua aspek. *Pertama*, manfaat pada perkembangan ilmu sejarah, khususnya sejarah sosial ekonomi. Penelitian ini juga sekaligus diharapkan bermanfaat untuk meluaskan horizon penelitian sejarah, sehingga tidak hanya terpaku pada penelitian sejarah yang hanya melihat dari aspek politik.

*Kedua*, manfaat bagi ilmu sosial lainnya, yaitu dengan memberikan data-data sosial ekonomi yang dapat digunakan dalam perkembangan ilmu yang bersangkutan.

### **1.6 Metode Penelitian**

Penelitian yang akan digarap ini merupakan penelitian sejarah. Ilmu sejarah adalah suatu ilmu yang mencoba mengkaji dan merekonstruksi persoalan masa lampau. Oleh karena itu, ilmu sejarah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap bahan-bahan tertulis peninggalan masa lampau. Tanpa itu, mustahil dapat mengkaji dan merekonsruksi suatu persoalan di masa lampau.

Untuk mengkaji dan merekonstruksi suatu persoalan di masa lampau itu, ilmu sejarah memiliki metode untuk melakukan penelitian yang disebut dengan metode sejarah. Ada empat tahapan kerja dalam metode sejarah, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan penulisan atau historiografi.

Heuristik yang merupakan tahapan kerja pertama dalam metode sejarah adalah suatu proses pencarian dan pengumpulan sumber yang mengandung informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi dan perkreditan rakyat di Tasikmalaya dalam kurun 1900 sampai dengan 2003. Pencarian sumber dilakukan pada sejumlah sumber tertulis, baik primer maupun sekunder, serta sumber-sumber lisan. Sumber primer berupa arsip-arsip kolonial, berita-berita di surat kabar, dan artikel-artikel sezaman yang dimuat dalam surat kabar dan majalah, sedangkan sumber sekunder berupa buku-buku. Pencarian sumber-sumber itu dilakukan di Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Di Bandung pencarian sumber dilakukan di Perpustakaan TNI-AD, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Perpustakaan ITB, Perpustakaan Dodi Tisnaamidjaja, dan Perpustakaan Pemda Propinsi Jawa Barat. Di Tasikmalaya, pencarian sumber diarahkan pada pencarian sumber-sumber lisan, dari mereka yang secara langsung terlibat dalam perkreditan rakyat di Tasikmalaya. Di Jakarta, pencarian sumber dilakukan di Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan Perpustakaan

PDII LIPI. Selain itu, heuristik juga dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait di Tasikmalaya.

Sumber-sumber yang telah terkumpul kemudian diverifikasi melalui kritik, baik ekstern maupun intern. Kritik ekstern digunakan untuk menentukan keabsahan data, sedangkan kritik intern diperlukan guna menilai kelayakan data.

Data yang diperoleh kemudian diinterpretasi atau dianalisis untuk mendapatkan fakta. Fakta yang telah terbentuk kemudian disintesis. Tahapan ini diperlukan untuk membuat fakta-fakta yang terlepas satu dengan lainnya menjadi satu hubungan yang saling berkaitan. Untuk mensintesis fakta-fakta itu dipergunakan teori ilmu sosial. Dalam penelitian ini teori yang dipergunakan adalah teori dan konsep yang berkaitan dengan sosial ekonomi. Dengan menggunakan teori ini rekonstruksi perkreditan dan kehidupan sosial ekonomi di Tasikmalaya tidak hanya sebatas pada aspek prosesualnya, tetapi juga dapat memberikan eksplanasinya.

Setelah hubungan antarfakta ditemukan, selanjutnya dilakukan tahapan terakhir, yaitu penulisan atau historiografi.

## **BAB II**

### **KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TASIKMALAYA**

#### **2.1 Kondisi Demografi**

Siapa saja yang mengunjungi daerah Tasikmalaya yang terletak di sebelah barat yang menghubungkan Bandung dengan Tasikmalaya melalui Garut akan tertarik dengan keadaan permukaan bumi daerah tersebut. Mereka akan melihat begitu banyak bukit kecil yang tersebar di daerah pesawahan yang subur serta akan melihat banyaknya bukit kecil yang tersebar di daerah pesawahan yang subur serta akan melihat banyaknya kolam ikan di antara rumah-rumah penduduk. Apabila kita berjalan dari Tasikmalaya ke daerah Singaparna bagian barat dan dari sana terus ke sebelah utara sampai ke Sukaratu atau Sindanggalih, atau dari desa Asta di sebelah selatan hingga ke Cibodas di sebelah utara maka kita akan melalui daerah Gunung Seribu, yang terdiri dari bukit-bukit yang beraneka ragam tingginya maupun bentuknya yang berjumlah 3.648 buah (Zen, 1968:62).

Daerah Tasikmalaya dibagi menjadi tiga bagian:

1. Tasikmalaya Utara
2. Tasikmalaya Tengah
3. Tasikmalaya Selatan

Di antara ketiga bagian itu, Tasikmalaya Utara adalah daerah yang paling

padat penduduknya. Dua per tiga dari jumlah penduduk Tasikmalaya menempati bagian utara itu, sedangkan luas areanya hanya sepertiga dari keseluruhan wilayah Tasikmalaya. Penduduk di bagian tengah dan selatan jarang. Jumlah penduduk Tasikmalaya berdasarkan data tahun 2005 adalah 1.645.971 jiwa. Dan bertambah rata-rata 2.56 % tiap tahun. Rata-rata kepadatan penduduk per kilo meter persegi adalah 645 penduduk (Kabupaten Tasikmalayaa Dalam Angka Tahun 2005).

Sebagian besar dari jumlah penduduk itu yakni 98% beragama Islam. Oleh karena itu, banyak pesantren yang tersebar di daerah-daerah pedalaman, di antaranya ada pesantren yang sudah bertaraf nasional yaitu Pesantren Cipasung Singaparna, dengan pendidikan mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula pesantren-pesantren lain di daerah pedalaman Singaparna ini, di antaranya Pesantren Sukamanah. Ada juga pesantren khusus putri di Cibeureum yaitu Pesantren Cintapada. Kemudian, Pesantren Cintawangu, pesantren khusus untuk pria. Pesantren-pesantren ini selain dijadikan tempat pembelajaran Islam dari putra-putri di sekitar Tasikmalaya, juga didatangi oleh para calon santri dari luar Jawa Barat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Tasikmalaya salah satu pusat pembelajaran Islam di Jawa.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Tasikmalaya ialah bertani, berdagang, dan bekerja sebagai buruh. Pada waktu luang petani mengerjakan sambilan yaitu kerajinan tangan yang menghasilkan berbagai barang anyam-anyaman, kain batik, dan lain-lain. Oleh karen itu, daerah Tasikmalaya terkenal

akan hasil kerajinan tangannya seperti tikar, topi, batik, tempat bunga, kursi, kap lampu, dan barang-barang lain dari bambu, kayu dan tempurung.

Dapat dikatakan bahwa, mata pencarian utama penduduk Tasikmalaya adalah bertani. Pada tahun 1972, ada usaha untuk mengembangkan pertanian di Tasikmalaya bagian selatan. Hal ini karena, Tasikmalaya bagian utara pada saat itu tidak mungkin lagi mengadakan perluasan sawah-sawah karena selain penduduknya sudah padat juga tanah-tanahnya sudah penuh dengan sawah. Sedangkan di daerah bagian tengah dan selatan kabupaten masih banyak yang kosong.

Pada tahun 1972 juga diperoleh data bahwa Tasikmalaya merupakan daerah surplus dengan hasil padinya. Daerah-daerah kelaparan dulu seperti Taraju dan Kawali sekarang sudah tidak ada lagi. Di daerah Sukaraja, yaitu bekas pusat Kabupaten Sukapura dahulu, tersebar luas pesawahan-pesawahan peninggalan bupati Sukapura yang telah berjasa dalam pembuatan sawah-sawah dan irigasi. Ciramajaya di Manonjaya yang juga merupakan daerah bekas ibu kota Manonjaya Sukaora lama, termasuk daerah surplus dalam penghasilan padinya (Marlina, 2007:33)

## **2.2 Kapitalisme Liberal**

Sebelum menguraikan lebih jauh situasi sosial ekonomi di Tasikmalaya akan diuraikan terlebih dahulu gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi di Indonesia pada masa sebelumnya, sebagai pengantar untuk memahami kondisi

sosial ekonomi secara keseluruhan. Hal ini besar manfaatnya untuk memahami kondisi sosial-ekonomi yang lebih khusus yang terjadi di Tasikmalaya pada masa-masa awal munculnya sistem perkreditan.

Sejak munculnya kapitalisme liberal sesudah tahun 1870, Indonesia dipandang semata-mata sebagai suatu *onderneming* besar (perkebunan besar), untuk menghasilkan barang-barang yang sangat diperlukan oleh pasar dunia. Dasar ekonomi yang dianut oleh kolonial Belanda adalah ekspor ekonomi<sup>1</sup>. Dalam hal ini pasar dalam negeri diabaikan, dengan alasan tidak menghasilkan laba yang besar atau tidak mendatangkan keuntungan memadai (Swasono, 1983:180)

Konsekuensi penerapan asas liberalisme ini, arus modal swasta mengalir deras ke tanah jajahan, yang direalisasikan dalam berbagai aktivitas perekonomian, khususnya perkebunan-perkebunan besar, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Selama masa ini, modal swasta dari Belanda dan negara-negara Eropa lainnya telah mampu mendirikan berbagai perkebunan, seperti perkebunan kopi, teh, tebu, kina, karet dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan perdagangan internasional semakin ramai antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, segala sarana dan prasarana yang menunjang lancarnya arus

---

<sup>1</sup> Ekspor Ekonomi yang dimaksud adalah sistem memutar ujung jadi pangkal. Artinya ekspor diutamakan, barulah datang impor sebagai tukaran. Impor itu sebagian besar berupa barang keperluan perusahaan besar dan orang-orang barat yang ada di sini. Keperluan rakyat yang diimpor terutama pakaian (Hatta, 1979:7-9)

perekonomian di bangun, seperti jalan, kereta api, irigasi, pelabuhan, angkutan laut, dan sebagainya.

Dalam masa kapitalisme liberal, perkebunan-perkebunan besar di Pulau Jawa berkembang dengan pesat dan menguntungkan pihak swasta maupun pemerintah kolonial. Sedangkan di pihak lain kesejahteraan orang-orang Indonesia di Jawa makin mundur. Menurunnya tingkat kemakmuran penduduk Jawa, disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, jumlah penduduk meningkat dengan sangat pesat pada akhir abad ke-19. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat ini mengakibatkan perbandingan antara jumlah penduduk dengan faktor produksi yang sangat terbatas tidak seimbang, sehingga pendapatan perkapita penduduk dari tahun ke tahun menurun (Leirissa, 1985:35).

Kedua, sebagai akibat sistem Tanam Paksa dan pekerjaan rodi, baik untuk kepentingan pejabat-pejabat pemerintah kolonial maupun untuk kepentingan mereka sendiri (pangreh praja). Dalam hal ini para petani tidak mempunyai motivasi kuat untuk bekerja keras, karena mereka tahu bahwa hasil kerja keras mereka akhirnya tidak mereka nikmati sendiri.

Ketiga, karena politik pemerintah kolonial terhadap Pulau Jawa. Selama abad ke-19, Jawa harus menanggung beban finansial untuk daerah-daerah lain di Kepulauan Indonesia yang dikuasai oleh Belanda. Di samping itu, penduduk Jawa pun membiayai segala perang kolonial yang dilakukan oleh pemerintah Hindia



Belanda dalam rangka usaha menguasai daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang belum diduduki, khususnya Aceh.

Faktor keempat, karena sistem perpajakan yang *regresif* yaitu pajak yang sangat memberatkan golongan berpendapatan rendah yang sebagian besar terdiri atas orang-orang pribumi. Beban rakyat itu ditambah lagi oleh terjadinya krisis yang telah melanda perkebunan-perkebunan besar sekitar tahun 1885, yang telah mendorong penghematan-penghematan drastis dengan cara penekanan-penekanan upah dan sewa tanah sampai tingkat yang serendah mungkin.

Hal yang juga perlu dilihat, faktor lainnya adalah karena penduduk Jawa mengalami penciptaan dalam penghasilan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perekonomian tradisional, seperti kerajinan tangan, sebagai akibat impor barang-barang dari luar negeri yang lebih unggul.

Pada masa liberal, secara politis masalah tanah mendapat jaminan hukum, yaitu dilindungi oleh Undang-Undang Agraria yang diundangkan tahun 1870. Tujuan utama dari Undang-Undang Agraria ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada para petani yang kehilangan hak milik tanah oleh pengusaha-pengusaha asing, tetapi dalam kenyataannya justru memberikan kebebasan dan keamanan bagi perusahaan-perusahaan swasta (Bulkin, 1984:10).

Menjelang awal abad ke-20, fenomena tersebut masih mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia. Proses hubungan antara kekuasaan bumiputera dan kekuasaan Belanda menunjukkan dua sifat yang berlainan. Di satu pihak

nampak makin luasnya kekuasaan Belanda, sedangkan di lain pihak terlihat semakin merosotnya kekuasaan-kekuasaan tradisional bumiputera. Pengaruh hubungan tersebut di antaranya menyangkut segi kehidupan sosial ekonomi.

Di bidang sosial ekonomi, kontak dengan Barat berakibat semakin lemahnya kedudukan kepala-kepala daerah pribumi. Kekuasaan mereka berangsur-angsur dikurangi dan lebih jauh ditempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing, sedang tenaga kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Para petani dibebani tugas mengolah sebagian dari tanah-tanahnya untuk ditanami dengan tanaman-tanaman ekspor, dan diharuskan menyumbangkan tenaga-tenaga kerjanya secara paksa kepada penguasa kolonial.

Kondisi masyarakat jajahan seperti tersebut di atas menimbulkan banyak reaksi yang hebat dari berbagai kalangan, baik kalangan politisi di parlemen Belanda maupun dari sebagian masyarakat Eropa yang berada di Hindia Belanda yang diidentifikasi sebagai kaum etisi.

Sejalan dengan terjadinya keresahan-keresahan di bidang politik, sosial ekonomi, dan budaya, menjelang tahun 1930an dunia di landa depresi ekonomi yang sangat berat. Dunia perdagangan menjadi sangat lesu. Hindia Belanda sebagai negeri pengekspor, sangat terpukul, sebab Hindia Belanda sebagai negeri agraris sangat merasakan kesulitan sebagai akibat kemerosotan harga, produksi yang terlalu tinggi dan persediaan-persediaan yang tidak dapat terjual. Di samping itu, Hindia Belanda sebagai negeri debitur sangat tertekan oleh beban hutang,

(Burger, 1970:204) lebih-lebih karena selama beberapa tahun tidak mau melepaskan standard emasnya. Perusahaan-perusahaan besar terkena. Akibatnya, terjadilah penurunan upah dan pemecatan buruh secara besar-besaran yang membawa penderitaan berat bagi rakyat. Krisis ekonomi dunia ini berlangsung dari tahun 1929 sampai dengan tahun 1937.

Di samping perusahaan-perusahaan besar yang terkena pengaruh depresi, juga pada periode tahun 1929-1937 kehidupan para petani dan pengusaha kecil ada dalam tekanan hidup yang cukup berat. Di daerah Tasikmalaya krisis ekonomi tersebut sangat terasa pengaruhnya, terutama di kalangan para pengusaha. Depresi ekonomi dunia dan tekanan-tekanan yang dilancarkan oleh pihak Belanda yang sedang sibuk menyelamatkan neraca perdagangan di negerinya, mengakibatkan kondisi sosial ekonomi di Indonesia umumnya, dan di Tasikmalaya khususnya sangat memprihatinkan.

Daerah Tasikmalaya memiliki posisi yang cukup strategis dan potensial bagi menata kehidupan ekonomi, karena daerah Tasikmalaya terletak di jalur pertemuan antara Propinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah dalam suatu route lalulintas darat jalur selatan.

Oleh karena letak geografis daerah Tasikmalaya yang cukup strategis dalam jalur perekonomian itu, maka masyarakat Tasikmalaya sangat merasakan akibat depresi ekonomi pada waktu itu. Kesulitan dalam bidang ekonomi ini terutama dirasakan oleh para pengusaha pada umumnya.

Gejala tersebut disamping dipengaruhi oleh depresi ekonomi, juga sebagai akibat, pertama, pemerintah kolonial Belanda menjalankan politik perekonomian berpasir "ekspor ekonomi" dan menjalankan sistem monopoli. Kedua, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu menjalankan taktik perekonomian tidak berdasar pada sifat-sifat kompromistis terhadap masyarakat Tasikmalaya. Ketiga, sebagai akibat gencarnya tekanan-tekanan dari para pengusaha minoritas Cina yang cukup berpengalaman dalam dunia dagang, dan modal cukup memadai, sehingga mereka selalu lebih unggul dalam dunia perdagangan (Marbun, 1986:16). Di samping itu, orang Cina bertindak sebagai pelepas uang dalam bentuk perjanjian mengikat (rentenir). Keempat, karena di kalangan para pengusaha itu sendiri belum menyadari arti penting integrasi dalam dunia usaha untuk memperkecil tingkat ketidakpastian dalam usaha. Konsekuensinya, para pengusaha yang baru mulai berdiri tersebut mendapat kesulitan dalam upaya pengadaan bahan baku. Sebagai contoh, bagi pengusaha batik di Tasikmalaya mereka mendapat kesulitan untuk pengadaan barang seperti *white cambrics*, obat-obatan batik, dan *chemacalion* (Koperasi Mitar Batik, 1972:2)

Dalam pergaulan hidup sehari-hari, masyarakat Tasikmalaya selalu ada dalam tekanan yang cukup berat dari penguasa pada saat itu. Keresahan sosial selalu terjadi dengan segala akibatnya. Gejala tersebut terjadi bukan melanda daerah Tasikmalaya saja, tetapi bersifat universal dan terutama daerah-daerah

yang secara langsung terjamah oleh Belanda. Hal tersebut menurut Onghokham sebagai akibat tampilnya eksploitasi ganda terhadap masyarakat pribumi.

Sebagai jawaban terhadap kondisi sosial ekonomi yang buruk itu, di antara sekian banyak penduduk Tasikmalaya tampillah sekelompok perajin dan pengusaha batik secara sembunyi-sembunyi mendirikan sebuah koperasi dengan nama Koperasi Pangrojong, yang bergerak dalam usaha perbatikan. Perlu diketahui, bahwa Koperasi Pangrojong merupakan cikal bakal dari Koperasi Mitra Batik yang lahir tanggal 17 Januari 1939.

Untuk perbandingan dapat dilihat Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan tahun 1911 di bawah pimpinan Haji Samanhudi. Sejak awal berdirinya bergerak di kalangan kaum pedagang dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi, tetapi ternyata cita-citanya kandas dan mendapat hambatan dari pihak kolonial Belanda, sehingga langkah perjuangannya tidak berjalan lama.

Kalau melihat kenyataan yang dialami oleh SDI, hal tersebut juga terjadi pada Koperasi Pangrojong, yaitu mendapat tekanan dan hambatan sehingga tidak mampu mempertahankan usianya lebih lama lagi. Adapun hal tersebut terjadi sebagai akibat pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Undang-undang Koperasi tahun 1915, Staatsblad No. 431, yang berisi ketentuan-ketentuan yang diperkirakan sulit atau berat dilaksanakan oleh gerakan koperasi di Indonesia.

Alasan pemerintah Hindia Belanda melakukan tekanan itu dapat dipahami karena Belanda sadar bahwa seandainya para pengusaha hidup dalam kondisi yang memungkinkan, berarti hal tersebut merupakan bahaya bagi keutuhan kedudukannya di Tasikmalaya. Usaha penduduk Tasikmalaya memperbaiki kehidupan sosia ekonominya bertujuan untuk mengimbangi ketidakselarasan yang diciptakan oleh sistem politik kolonial yang telah banyak memberi fasilitas longgar dan menguntungkan bagi para pedangan asing, sedangkan di pihak lain para pedangan pribumi mendapat tekanan yang berat, sehingga sebagai realisasinya mereka sangat sulit mengembangkan dunia usaha.

## **BAB III**

### **KREDIT RAKYAT DI TASIKMALAYA**

#### **3.1 Tradisi Kredit**

Asal mula munculnya sistem perkreditan tidak dapat diketahui secara pasti karena bentuk-bentuk perkreditan itu telah berkembang di dalam masyarakat Indonesia sejak sebelum berkembangnya peradaran uang. Dalam kasus-kasus pertukaran barang atas dasar kredit, uang dan lalu lintas uang, sama sekali tidak berperan, dan hal itu telah banyak dilaporkan oleh penulis-penulis Belanda.

Di Priangan sejak pertama kali muncul penyerahan wajib berupa kopi dilakukan dengan sistem uang muka karena penduduk tanpa diberikan uang muka terlebih dahulu tidak akan bisa mengembangkan pekerjaannya. Mula-mula sistem uang muka ini dilakukan dengan sehat melalui para bupati, namun lama kelamaan uang muka tersebut tidak saja diperuntukkan bagi para petani kopi, melainkan juga untuk kepentingan rumah tangga keluarga para bupati. Dengan demikian hutang para bupati menjadi bertambah besar dan akhirnya pembayaran dengan sistem perkreditannlah yang mesti dilakukan (Burger dalam Sulistyawardhani, 2000:14). Ini artinya, meskipun pemberian uang muka masih tetap dilakukan untuk berlangsungnya budaya dan transport kopi, petani-petani hanya menerima uangnya sangat sedikit.

Pertukaran barang atas dasar kredit seperti yang telah dikemukakan di atas terjadi oleh karena adanya perubahan dalam ekonomi. Masyarakat tidak lagi cukup dengan barang-barang yang dihasilkan sendiri melainkan juga membutuhkan barang-barang lain yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mulai dari garam, ikan asin, kain, perkakas rumah tangg, bahkan candu. Terjadinya perubahan dalam ekonomi uang berkembang, menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan uang tunai yang berkembang dalam masyarakat memberikan kesempatan bagi orang-orang Cina, Arab, Eropa dan orang-orang Indonesia sendiri untuk melipat gandakan kekayaannya dengan meribakan uang. Dari sinilah kemudian timbul dan berkembang bentuk-bentuk kredit baik itu berupa uang, barang, tanah maupun pekerjaan,

Kredit uang, biasanya diberikan oleh orang Indonesia, Eropa, Arab maupun oleh orang Cina yang sering disebut *mindring*. Bunga pinjama dari kredit uang ini umumnya mencapai 100% hingga 200% (Sulistyawardhani, 2000:15). Di dalam sistem kredit uang ini, apabila pada akhirnya hutang itu menjadi bertambah besar karena tingginya bunga pinjaman dan tunggakan cicilan bunga, maka orang yang berhutang tersebut dapat membebaskan diri dari pinjaman pokok dan bunganya dengan cara menyewakan sebagian, terkadang juga seluruh lahan miliknya kepada pemberi hutang dalam jangka waktu tertentu. Pemilik tanah baru akan memperoleh kembali tanahnya setelah ia mengembalikan uang sejumlah yang dipinjam dulu. Jadi perjanjian kredit uang dapat berubah menjadi



persewaan tanah apabila si peminjam belum dapat mengembalikan pinjaman uangnya.

Kredit atas tanah, yaitu dengan menyewakannya atau menggadaikannya. Petani yang membutuhkan uang menyewakan atau menggadaikan tanah mereka untuk beberapa tahun, sedangkan uang sewanya dibayar di muka. Persewaan tanah berupa lahan padi paling menguntungkan bila dilakukan pada bulan September dan Oktober, yaitu saat penggarapan sawah dimulai. Di dalam sewa yang disepakati itu tunjangan harus dilakukan untuk hilangnya keuntungan karena penyewa diandaikan akan mengalami kerugian setelah mengeluarkan uang muka. Pada masa penyewaan tanah berlangsung pemilik tanah masih harus memikirkan beban berupa pajak tanah dan kewajiban-kewajiban lain yang bersangkutan dengan sawah itu dengan demikian pemilik tanah hanya mendapat keuntungan yang sedikit sekali dari hasil persewaan tanahnya (Bremen, 1986:85-86). Sistem persewaan tanah semacam ini mengakibatkan timbulnya ketergantungan jangka panjang antara petani dan penyewa tanah.

Sistem persewaan tanah dengan pembayaran uang muka seperti tersebut di atas juga ditemukan di Tasikmalaya. Cara ini dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperoleh hasil panen sebanyak mungkin dengan membayar tenaga kerja serendah mungkin. Untuk maksud ini bagi hasil merupakan cara yang biasa dilaksanakan dengan memberikan tanah itu kembali kepada pemiliknya sebagai penggarap, atau kepada pihak lain yang berminat namun dengan persyaratan yang

berat. Pertama, penggarap menyerahkan separuh hasil panenannya setelah dikurangi beban biaya panen, dan juga mengembalikan dua kali lipat jumlah padi yang diterimanya sebagai gabah bibit. Petani penggarap sering menerima bagian panenannya baik dalam bentuk padi maupun uang panjar yang dibayarkan tunai untuk biaya penggarapan pada saat memulai kontrak. Dengan demikian pada akhirnya ia tidak menerima keuntungan apa-apa. Kedua, dengan menerima uang panjar untuk menanggulangi biaya penggarapan berarti petani penggarap mengikatkan diri untuk menyerahkan padinya sebanyak yang telah ditentukan terlebih dahulu lebih kurang separuh dari hasil panen. Dengan kontrak atau sistem peminjaman seperti ini penggarap harus menanggulangi segala akibat yang terjadi, dan jika terjadi kegagalan panen, penggarap harus melunasi hutangnya pada panen berikutnya (Bremen, 1986:88-89)

Di dalam penggadaian tanah, tanah dikuasai oleh pemberi kredit sampai saat pelunasan hutang. Perjanjian itu biasanya disertai persyaratan bahwa tanah yang digadaikan itu baru boleh ditebus setelah pemegang gadai menikmati hasil sejumlah panen tertentu darinya. Hasil-hasil itu hanya dianggap sebagai bunga yang menjadi hak pemegang gadai. Dengan menggadaikan tanahnya posisi petani menjadi lebih buruk lagi dibandingkan bila ia menyewakan tanahnya. Apabila ia menyewakan, dengan sendirinya akan memperoleh kembali hak atas tanahnya pada akhir masa sewa, sedangkan apabila ia menggadaikan tanahnya, ia baru akan memperoleh kembali tanahnya setelah melunasi uang gadainya, tetapi biasanya

keadaan keuangan di peminjam tersebut sangat buruk sehingga biasanya tidak mampu lagi membayar kembali uang gadainya.

Bentuk kredit yang lain adalah kredit atas barang. Kredit barang juga ditemukan di Tasikmalaya. Kredit barang juga bisa berupa hasil pertanian seperti padi atau bibit. Pengembalian kredit ini dilakukan setelah panen dan dibayarkan dua kali lipat dari apa yang dipinjamkan. Dalam kredit barang ini dikenal sistem "ijon", yaitu sistem pemberian uang muka untuk tanaman beberapa bulan sebelum panen, dan sistem "tebasan yaitu penjualan padi sesudah akan dipanen. Selain hasil-hasil pertanian, kredit atas barang juga dapat berupa barang-barang rumah tangga. Biasanya pemberian kredit ini dilakukan oleh beberapa orang Cina yang biasanya disebut dengan pedagang kelontong. Pedagang kelontong ini membawa barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti kaun, benang, pakaian, minuman, kertas, taplak meja dan sebagainya dengan dijajakan secara keliling keluar masuk kampung atau desa. Untuk jumlah yang terbatas barang-barang tersebut dibawa sendiri oleh pedagangnya dengan menaruh di atas pundak, tetapi apabila barang dagangan itu agak banyak maka barang-barang tersebut ditempatkan di dalam keranjang.

Di atas telah dipaparkan berbagai macam bentuk tradisi perkreditan yang berkembang di masyarakat Jawa pada umumnya serta di Tasikmalaya pada khususnya. Menjadi pertanyaan kemudian adalah sebab-sebab timbulnya kebutuhan akan kredit.

De Wolff van Westeroode mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat khususnya petani membutuhkan pinjaman uang adalah untuk membayar pajak (Sulistawardhani, 2000:20). Sistem perpajakan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia telah ada sejak pertengahan abad 18. Selama masa VOC sistem perpajakan adalah berupa beras yang harus dibayarkan oleh rakyat. Dalam mengatur pungutan pajak ini para kepala desa oleh VOC diberi kekuasaan penuh dalam menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing petani. Kebebasan ini mengakibatkan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang yang sering merugikan rakyat. Sistem perpajakan ini kemudian ditentang oleh Raffles yang kemudian hari menetapkan pajak secara perseorangan.

Pada tahun 1882 pemerintah mengeluarkan penetapan mengenai penarikan pajak kepala dalam bentuk uang. Pada penarikan pajak dengan sistem ini para pemilik tanah, petani, penyewa dan buruh tani terkena pungutan pajak dalam jumlah yang sama (Bremen, 1986:39). Oleh karena pemerintah mengharuskan pajak dibayar dengan uang, maka rakyat harus menyediakan uang dengan jumlah tertentu untuk melunasi kewajiban pajaknya. Penyedia pajak itu hanya bisa diperoleh dari keuntungan penjualan hasil pertanian. Jika pada suatu ketika hasil pertaniannya gagal, maka mereka terpaksa harus berhutang kepada para pelepas uang untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu guna melunasi kewajiban pajaknya. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh penduduk dan sulitnya

mendapatkan uang karena penghasilannya yang rendah menyebabkan penduduk sering berhutang atau pinjam uang kepada para pelepas uang.

Rendahnya penghasilan penduduk merupakan salah satu aspek penyebab timbulnya kebutuhan akan peminjaman uang atau kredit. Rendahnya pendapatan penduduk serta banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi sering menyebabkan penduduk terpaksa harus mengadakan peminjaman uang.

Di samping faktor-faktor di atas, timbulnya kebutuhan akan peminjaman uang juga disebabkan karena keinginan masyarakat untuk memperoleh penghargaan sosial sesuai dengan ukuran-ukuran tradisional, yang dalam masyarakat masih mempengaruhi perilaku anggotanya. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang terkadang melampaui kemampuan mereka. Demikian pula halnya dengan keharusan-keharusan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial seperti mengadakan kenduri yang mempengaruhi sifat sosial sekaligus keagamaan yang juga ditentukan oleh adat.

Di dalam masyarakat Tasikmalaya terutama petani pada saat itu yang penghasilannya hanya pada saat-saat tertentu saja, sementara simpanan uang atau tabungan juga hampir dikatakan tidak ada, tuntutan-tuntutan sosial seperti yang di sebut di atas sering menyebabkan timbulnya suatu permasalahan tersendiri. Terkadang di saat panen mereka harus tetap pula dituntut untuk melakukan kewajiban-kewajiban sosial seperti di atas. Hal yang demikian ini memaksa petani untuk mengadakan pinjaman uang kepada para pelepas uang.

Terdapat suatu keadaan yang menyebabkan penduduk terpaksa harus meminjam uang, seperti misalnya beban pajak yang berat, tuntutan-tuntutan adat, rendahnya pendapatan penduduk, dan timbulnya berbagai macam bentuk kredit yang diadakan oleh para pelepas uang mendorong pemerintah kolonial untuk mendirikan suatu lembaga perkreditan guna memperbaiki keadaan sosial ekonomi penduduk terutama di pedesaan, termasuk dalam hal ini di Tasikmalaya.

### **3.2 Lembaga Perkreditan Rakyat**

Kebutuhan kredit bagi masyarakat desa pada sekitar tahun 1900 semakin mendapat perhatian karena pegawai-pegawai pemerintah dalam negeri mengetahui bahwa banyak orang-orang desa terlibat hutang kepada para pelepas uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Selain itu diketahui pula bahwa banyak petani yang terpaksa harus menyerahkan hasil-hasil pertanian mereka dengan harga yang murah karena menerima uang muka terlebih dahulu. Mereka juga tahu bahwa banyak pemilik tanah kehilangan hak atas tanahnya karena digadaikan demi untuk membayar hutang-hutangnya dan dengan demikian turun tingkatnya menjadi buruh tani, namun belum ada usaha yang serius untuk memperbaiki keadaan ini atau untuk menciptakan suatu organisasi yang tahan lama dan dinamis yang dapat menyediakan kredit yang dibutuhkan bagi orang desa dengan syarat-syarat yang tidak begitu menekan.

Akan tetapi, sebenarnya tahun-tahun tersebut sudah ada bank-bank priyayi, yaitu semacam perkumpulan pegawai-pegawai pemerintahan dalam negeri dan kepala-kepala daerah yang kebanyakan didirikan atas inisiatif pemerintah Eropa. Bank-bank ini bertujuan memberikan kredit bagi anggota-anggotanya dengan iuran dan tabungan dan dengan demikian mereka dibebaskan dari cengkeraman para pelepas uang. Bank-bank ini pada perkembangan yang baik, namun juga tidak mati. Hal ini disebabkan karena pegawai-pegawai pemerintah dalam negeri pribumi yang biasanya menjadi pengurus dari bank-bank itu mempunyai hutang yang begitu banyak sehingga sering tidak bisa mengembalikan, dan dengan demikian menghambat perkembangan bank itu sendiri.

Selanjutnya, pada tahun 1828 berdiri *Javasche Bank*, suatu lembaga perbankan swasta yang melayani kebutuhan kredit jangka panjang kepada sektor perdagangan swasta pada masa *Cultuurstelsel*. Sampai tahun 1853 *Javaschee Bank* masih merupakan satu-satunya lembaga perbankan swasta yang memberikan kredit kepada sektor perdagangan swasta. Pada tahun-tahun berikutnya berdiri lembaga perbankan yang lain, antara lain *Nederlandsch Indische Landbouw Maatschappij* (1857), *Internationale Crediet en Handelsvereniging* *Rotterdamsche International* (1863), *Handels Vereeniging Amsterdam* (1881), *Koloniale Bank* (1883) dan sebagainya. Bank-bank ini memberikan kredit baik kepada perusahaan pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, maupun

pengangkutan, terutama yang ditangani orang kulit putih dan oleh sebagian kecil orang Cina. Akan tetapi, bank-bank ini tidak memberikan kredit bagi kebutuhan pertanian pribumi di pedesaan.

Berdasarkan Keputusan Raja tanggal 10 Juli 1912 (Stbl.3939) dibentuklah Kas Sentral untuk badan perkreditan Rakyat. Kas sentral ini bertujuan untuk memberikan dana usaha dan menerima uang untuk ditanamkan di lembaga-lembaga perkreditan rakyat dan juga memberikan nasehat dan bantuan dalam pengelolaan lembaga-lembaga perkreditan rakyat. Dengan didirikannya Kas Sentral ini menunjukkan bahwa telah tercapai tahap pendahuluan dimana penciptaan suatu lembaga finansial pusat yang telah menjadi suatu kebutuhan demi konsolidasinya apa yang telah dicapai dan demi untuk kepentingan lebih lanjut.

Sebelum tahun 1913, lembaga-lembaga perkreditan rakyat yang terdapat dalam periode ini adalah lumbung desa, bank desa dan bank daerah. Ketiga lembaga perkreditan ini mempunyai fungsi dan wilayah kerja yang berbeda-beda. Lumbung desa berfungsi memberikan kredit berupa padi di dalam lingkup desa, bank desa berfungsi memberikan kredit berupa uang dalam jumlah kecil di lingkup desa, sedangkan bank daerah memberikan kredit berupa uang baik dalam jumlah kecil maupun besar dalam lingkup daerah.

Berdasarkan Memori Serah Jabatan Karesidenan Priangan (1921-1930), terungkap bahwa Bank Daerah pertama yang berdiri di Priangan adalah di Garut



pada tahun 1898. Oleh karena keberhasilan Bank Daerah di Garut, maka tiap afdeeling didirikan juga bank sejenis. Pada tahun 1902 didirikan Bank Daerah di Tasikmalaya. Afdeeling Tasikmalaya mempunyai dua Bank Daerah yaitu di Ciamis dan Tasikmalaya sendiri. Bank Daerah di Ciamis adalah lanjutan dari bank daerah ketika Ciamis masih menjadi afdeeling dari Karesidenan Cirebon. Ketika daerah bagian selatan Karesidenan Cirebon digabungkan dengan Karesidenan Priangan bank daerahnya tetap berdiri sendiri, karena ada kesulitan untuk menggabungkannya dengan bank daerah di Tasikmalaya.

Pada tahun 1930an, Bank Daerah di Karesiden Priangan memiliki modal usaha mendekati sejuta gulden. Bank Daerah di Tasikmalaya termasuk bank yang paling maju. Pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia berakhir bank daerah di Priangan banyak menolong perkebunan teh rakyat, terutama di Sukabumi dan Garut, yang pada waktu itu terancam jatuh karena harga teh yang sangat merosot. Bank daerah itu dapat membantu pengusaha perkebunan teh itu sampai kemudian harga teh menjadi lebih baik lagi.

Bank ini tidak hanya memberikan kredit uang kepada nasabahnya , tetapi juga memberikan kredit padi. Usaha bank tidak hanya memberikan kredit kepada perorangan dan petani, tetapi juga kepada para pedagang dan juga bagi pembudidayaan hasil-hasil tumbuhan perdagangan, misalnya: teh, tembakau, tebu, kacang, membuka sawah-sawah baru, mengembalikan hutang tanah dan pohon-pohon kelapa yang digadaikan, dan sebagainya. Bank ini juga mempunyai

pengaruh terhadap pembangunan dan perlengkapan rumah, sebagai contoh pendirian warung-warung dan toko-toko.

Modal usaha dari bank kredit ini biasanya terdiri dari deposito, tabungan, iuran secara berkala dari pegawai-pegawai pribumi. Bila bank pada waktu berdiri belum mempunyai modal usaha maka akan mendapat subsidi dari pemerintah. Subsidi yang diberikan pemerintah tersebut selain untuk modal usaha juga untuk menutupi biaya kepengurusan (Sulistewardhani, 2000:36).

Pinjaman pada dasarnya diberikan terutama untuk kepentingan usaha perkreditan, seperti membuka sawah, penggarapan sawah, pembelian hewan bajak, menebas tanah yang digandakan, dan sebagainya. Tetapi selain itu juga diberikan untuk keperluan usaha perdagangan, peternakan dan sebagainya.

Jaminan kredit dapat berupa barang maupun orang, tetapi keduanya sering mempunyai kelemahan. Jaminan berupa tanah biasanya sulit karena dilarangnya orang pribumi menyerahkan tanahnya kepada orang yang bukan pribumi, padahal tanah adalah satu-satunya harta milik orang pribumi yang dapat dijadikan jaminan.

Jaminan berupa orang sering dianggap tidak praktis karena si peminjam orang harus membawa orang itu baik pada proses meminjamannya, pada saat pemberian uang pinjaman, maupun pada waktu pengembalian uang pinjaman.

Jangka waktu peminjaman tergantung pada tujuan pinjaman dan disesuaikan dengan waktu pihak peminjaman mulai dapat memungut hasil dari

uang pinjaman itu. Pembayaran kembali memang harus dilakukan tidak lama setelah pihak peminjam dapat memungut hasil dari uang yang dipinjamkan itu.

Di dalam memungut bunga dari pinjaman untuk masing-masing bank tidak sama. Besar kecilnya bunga ditentukan oleh biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing bank.

Penagihan tunggakan biasanya dilakukan oleh pihak bank sendiri baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Pihak pangrehpraja dapat diminta sebagai perantara kalau penagihan yang dilakukan oleh bank itu sudah berkali-kali tanpa membawa hasil.

Lumbung desa semula didirikan untuk memberi kredit yang berupa bahan pangan kepada penduduk desa pada masa panceklik. Lumbung ini sebelumnya dinamakan "Lumbung Miskin" atau "Lumbung Jakat". Kemudian, lumbung semacam itu sudah dihapus, karena pengurusnya sebagian besar tidak cakap dan tidak baik. Lumbung yang masih tetap ada selanjutnya dinamakan Lumbung Desa.

Dari waktu ke waktu jumlah Lumbung Desa juga berkurang. Pada tahun 1917, di Karesidenan Priangan, jumlahnya 1.175, pada tahun 1930 berkurang menjadi 1.121. Kemunduran ini disebabkan karena pelaksanaannya sukar antara lain mengenai pengangkutan padi, baik pengangkutan pada waktu meminjam maupun pada waktu mengembalikannya. Pengangkutan ini memerlukan biaya dan tenaga sendiri. Menurut kenyataannya sebagian besar dari lumbung desa itu

berdiri di daerah-daerah yang sarana komunikasinya sulit, seperti di distrik Jampangkulon dan Jampangtengah. Peredaran kreditnya juga mundur. Kalau sebelumnya sekitar 273.951 pikul, pada tahun 1930 berkurang menjadi lebih kurang 267.617 pikul. Pada masa harga padi baik peredaran kreditnya juga baik, sehingga lumbung desa dapat terus mempertahankan usahanya. Bahkan, kadang lumbung yang sudah lumpuh pun dapat hidup lagi.

Faktor yang datangnya kemudian yang menyebabkan usaha lumbung desa itu mundur ialah munculnya bank desa. Perkreditan dari bank desa memang lebih lincah daripada perkreditan dari lumbung. Maka bila bank desa muncul di suatu desa dan tampak bekerjanya baik, maka lumbung mundur. Di kemudian hari lumbung desa itu mungkin akan lenyap.

Pernah ada yang mengatakan bahwa adanya lumbung-lumbung itu menghalangi perdagangan padi. Ucapan ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya lumbung-lumbung desa. Orang-orang ini biasanya mengambil keuntungan dari kemiskinan kaum tani. Bila para petani kekurangan uang, padi dibeli dengan sangat murah dengan maksud agar dikemudian hari padi itu dijual kembali kepada para petani dengan hasil yang berlipat ganda.

Adanya lumbung-lumbung desa itu mempunyai banyak pengaruh terhadap keadaan ekonomi pedesaan. Pertama menurunkan bunga pinjaman padi di luar usaha lumbung desa. Kedua, penjualan persediaan padi yang pada waktu

panceklik mengakibatkan harga naik itu dapat ditekan. Ketiga, kelebihan uang kas lumbung dapat diserahkan kepada kas desa, dengan demikian dapat mempetbaiki keuangan kas desa. Keempat, cadangan kekayaan lumbung dapat dipergunakan sebagai modal usaha bank desa

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ekonomi uang yang semakin meluas dalam kehidupan pedesaan di Tasikmalaya menyebabkan masyarakat semakin tergantung kepada uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan ekonomi maupun sosial. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terhadap uang telah memunculkan jenis kegiatan baru yaitu perkreditan.

Rendahnya penghasilan penduduk merupakan salah satu aspek penyebab timbulnya kebutuhan akan peminjaman uang atau kredit. Selain itu, timbulnya kebutuhan akan peminjaman uang juga disebabkan karena keinginan masyarakat untuk memperoleh penghargaan sosial sesuai dengan ukuran-ukuran tradisional, yang dalam masyarakat masih mempengaruhi perilaku anggotanya. Hal tersebut mendorong masyarakat untuk melakukan pengeluaran yang terkadang melampaui kemampuan mereka. Demikian pula halnya dengan keharusan-keharusan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial seperti mengadakan kenduri yang mempengaruhi sifat sosial sekaligus keagamaan yang juga ditentukan oleh adat.

Sektor ekonomi di Tasikmalaya dapat dikategorikan dalam ekonomi pedesaan, tentu saja yang berhubungan dengan pertanian, perdagangan, peternakan, dan industri rumah tangga. Lembaga-lembaga ekonomi seperti kredit, koperasi, lumbung desa, dan bank, sudah banyak dikenal dalam kehidupan sektor ekonomi di Tasikmalaya; terutama

atas campur tangan kekuasaan negara. Lembaga-lembaga inilah yang kemudian mengubah ekonomi petani di Tasikmalaya.

Namun terkadang, transaksi kredit yang dilakukan oleh para pelepas uang memang seringkali merugikan masyarakat, misalnya dengan diambilalihkan barang-barang yang digunakan sebagai jaminan oleh pemberi kredit untuk pinjaman uang yang berjumlah besar, seperti tanah. Meskipun demikian, aktivitas perkreditan yang dilakukan pelepas uang selalu menarik minat masyarakat, terutama karena pengelolaannya yang luwes dan hubungan personal antara pemberi pinjaman dan peminjam. Salah satu karakteristik dari pelepas uang yang menarik nasabahnya, karena prosedur yang sederhana untuk memperoleh pinjaman. Pinjaman diberikan tanpa meminta jaminan untuk peminjaman dalam jumlah tertentu dan hanya atas dasar kepercayaan. Bahkan angsurannya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan si peminjam.

Bagi masyarakat tertentu, para pelepas uang merupakan tempat untuk meminta pertolongan di saat mereka benar-benar membutuhkan dana dalam waktu yang sangat mendesak. Di sebuah tempat yang miskin modal, namun memiliki sumber daya lain yang memadai, tentu sistem perkreditan yang tidak menjerat rakyat, sangat dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas. 1988. *Mitos Pribumi Malas*. Jakarta: LP3ES.
- Arsip Nasional Republik Indonesia. 1976. *Memori Serah Jabatan 1921-1930 Jawa Barat*. Jakarta: Penerbitan Sumber-sumber Sejarah Arsip Nasional Republik Indonesia
- Booth, Anne. 1998. *The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries: A History of Missed Opportunities*. Canberra: The Australian National University.
- Bremen, Jan. 1986. *Penguasaan Tanah dan Tenaga Kerja di Jawa di Masa Kolonial*. Jakarta: LP3ES
- Burke, Peter. 2002. *Sejarah dan Teori Sosial*. Terj. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Burger, D.H. dan Prajudi Atmosudirdjo. 1962. *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*. Djilid I. Djakarta: Pradnja Paramita.
- Cator, Writser Jans. 1936 *The Economic Position of The Chinese in The Netherlands Indie..* Oxford: Basil Blackwell.
- Day, Clive. 1975. *The Policy and Adiministration of the Dutch in Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Departement van Landbouw. 1931. Nijverheid en Handel. *Volkstelling 1930*. Batavia Centrum.
- Enie, A Basrah. 1995. *Enie Sosok Pengusaha Batik Tasik (1906-1966)Menguak Sejarah Pematikan di Tasikmalaya*. Diterbitkan oleh Penulis.
- Furnivall, J.S. 1983.*Hindia Belanda: Satu Pengkajian Ekonomi Majmuk*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Gonggrijp, G. 1949. *Schets Eener Economische Geschiedenis van Nederlands-Indië*. Haarlem: de Ervan F. Bohn.
- Graaf, H.J. de. 1949. *Geschiedenis van Indonesie*. 's Gravenhage-Bandung: NV Uitgeverij W. van Hoeve.



- Graaf, S de. en D.G. Stibbe. 1918. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. Tweede Deel. s'-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Van Gutem, V.B. 1919. *Tjina Minderung, Eenige aantekenigen over het Chineesche geldchieterswezen op Java*. Koloniale Studien. Tahun III Jilid. I.
- Haan, F. de. *Priangan: De Preanger Regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811*. Deel I-IV. Batavia: Bataviaasche Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, 1910-1912.
- Joyohadikusumo, Sumitro dan Dawam Rahardjo. 1989. *Kredit Rakyat di Masa Depresi*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowijoyo. 1994. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kunto, Haryoto. 1996. *Ramadhan di Priangan (Tempo Doeloe)*. Bandung: Granesia.
- Lindbland, J. Thomas ed. 2000 *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia Berbagai Tantangan Baru*, Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lubis, Nina H. 2000. *Sejarah Kota-kota Lama di Jawa Barat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Marlina, Ietje. 2007. *Perubahan Sosial di Tasikmalaya; Suatu Kajian Sosiologis Sejarah*, Jatinangor: Alqa Prisma Interdelta.
- Nugroho, Heru. 2001. *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Paulus, J. 1917. *Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië*. Eerste Deel. 'S Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Raffles, Thomas Stamford. 1988. *The History of Java*. Vol. I&II. Singapore: Oxford University Press.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan Dharmono Hardjowijono. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ritzer, George. 2000. *Sociological Theory*. Singapore: McGraw-Hill.

- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2002. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Scharader, Heiko, 1994. *Changing Financial Landscapes in India and Indonesia: Sociological Aspects of Monetisation and Market Integration*. Bielefeld: Sociology of Development Research Center.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South Asia*. New Heaven and London: Yale University Press Ltd.
- Stapel, F.W. 1940. *Geschiedenis van Nederlandsch Indie*. Deel V. Batavia.
- Sucipto. 1985. *Studi Proses dan Karakteristik Imigrasi Tukang Kredit dari desa-desa Kabupaten Tasikmalaya*. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung Fakultas Pascasarjana.
- Sulistyawarhani, M.G. 2000. *Kredit Rakyat; Suatu Studi Pendahuluan Pada Awal Abad XX di Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Kartika Budaya.